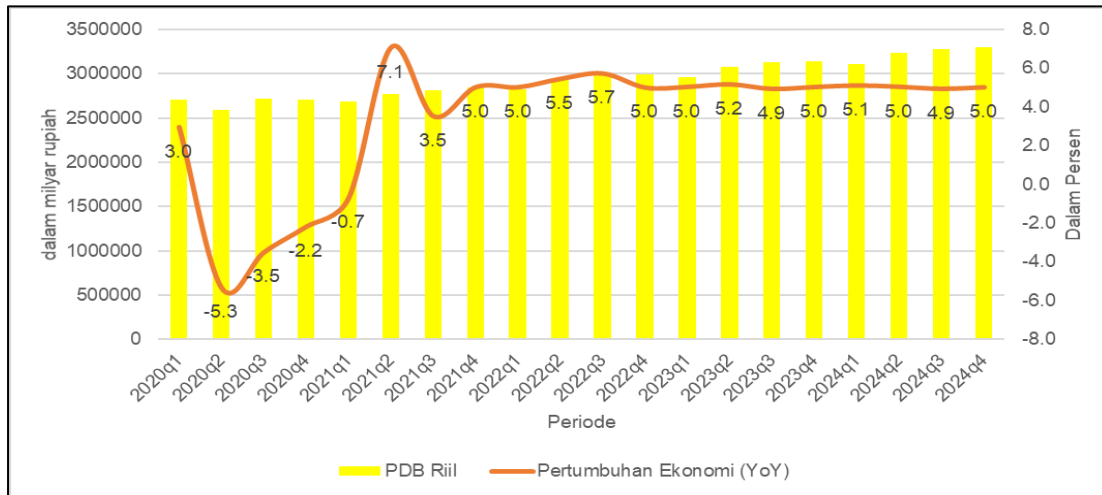


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran standar dalam menilai kinerja perekonomian suatu negara. Indikator ini menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan nilai tambah lebih besar dari periode ke periode berikutnya. Dalam kajian makroekonomi, pengukurannya merujuk pada perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, yaitu total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam satu perekonomian setelah mengontrol dampak inflasi, sehingga angka yang dihasilkan benar-benar mencerminkan ekspansi output nyata.

Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang sangat strategis sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi nasional, terutama mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara (Febriyani, 2017). Sejak awal dekade 2000-an, perekonomian Indonesia menunjukkan kecenderungan tumbuh secara relatif konsisten dengan rata-rata laju pertumbuhan berkisar antara 5-6% per tahun. Meskipun demikian, stabilitas tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural, seperti ketimpangan sosial, praktik korupsi, serta keterbatasan kualitas dan pemerataan infrastruktur. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan ekonomi.



Grafik 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2020q1-2024q4

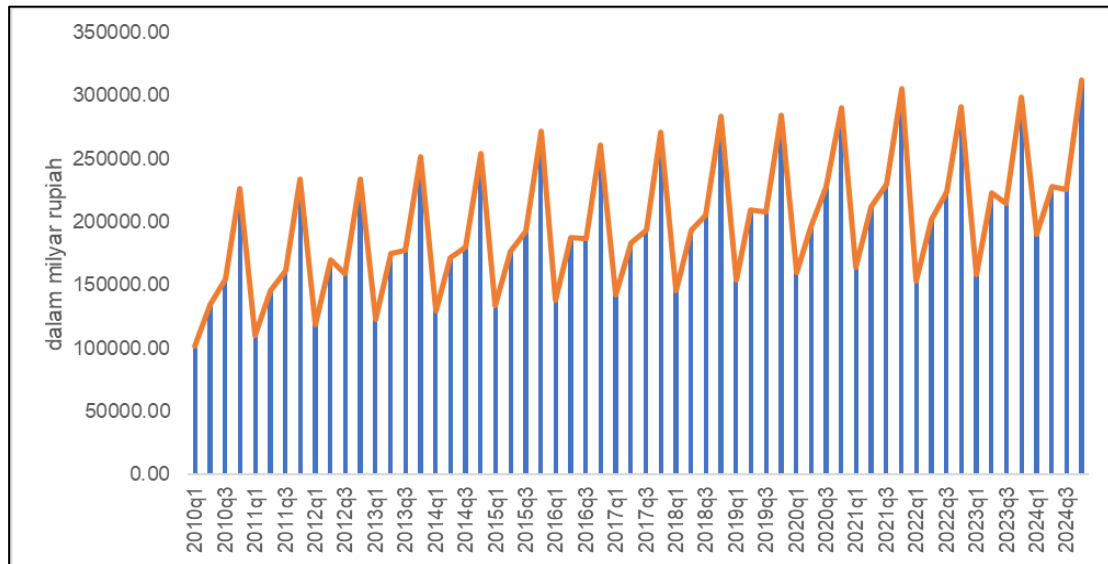
Sumber: Bank Indonesia, 2024

Ilustrasi pada Grafik 1.1 memperlihatkan dinamika PDB riil dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun lima tahun terakhir. Secara umum, PDB riil menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya ekspansi kapasitas produksi nasional. Namun demikian, pola pertumbuhan ekonomi terlihat berfluktuasi, mencerminkan perubahan kecepatan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2020, khususnya kuartal kedua dan ketiga, terjadi kontraksi ekonomi yang cukup dalam, yang sangat erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah sebesar -5,3% pada kuartal II. Memasuki tahun 2021, perekonomian Indonesia mengalami pemulihan yang kuat dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 7,1% pada kuartal II, menandai fase pemulihan pascapandemi. Selanjutnya, pada periode 2022 hingga 2024, laju pertumbuhan ekonomi kembali berada pada kisaran 5–6% per tahun

dengan fluktuasi yang relatif terbatas, menunjukkan arah pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan (Indonesia, 2024).

Capaian pertumbuhan ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi melalui pemanfaatan kebijakan belanja negara, khususnya konsumsi pemerintah (Afonso & Sousa, 2020). Dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pengeluaran pemerintah berperan sebagai instrumen stimulus yang mampu menjaga dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Apabila dialokasikan secara tepat, peningkatan belanja pemerintah dapat memperkuat permintaan agregat serta menimbulkan efek pengganda yang memberikan dorongan positif bagi aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Galic et al., 2021) (Wang et al., 2020).

Meskipun demikian, dampak konsumsi pemerintah terhadap perekonomian sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan anggaran dan tingkat keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal (Febriyani & Utari, 2020). Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui perencanaan anggaran yang terarah, implementasi kebijakan yang akuntabel, serta evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja publik (Olaoye & Afolabi, 2021), sehingga pengelolaan anggaran yang efisien dan strategis menjadi fondasi utama bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.



Grafik 1. 2 Konsumsi Pemerintah Indonesia Periode 2010q1-2024q4

Sumber: Bank Indonesia, 2024

Grafik 1.2 menggambarkan dinamika pengeluaran konsumsi pemerintah Indonesia selama periode 2010 kuartal I hingga 2024 kuartal IV yang diukur dalam satuan miliar rupiah. Pola yang tampak menunjukkan kecenderungan berulang setiap tahun, di mana lonjakan belanja pemerintah umumnya terjadi pada kuartal terakhir. Fenomena ini mencerminkan tingginya realisasi anggaran menjelang berakhirnya tahun fiskal, sejalan dengan mekanisme penutupan dan penyerapan anggaran tahunan yang berlaku.

Secara keseluruhan, konsumsi pemerintah Indonesia memperlihatkan arah perkembangan yang meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan yang cukup menonjol terlihat pada tahun 2020, khususnya pada kuartal II, ketika nilai belanja pemerintah melonjak dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut merefleksikan besarnya respons kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam

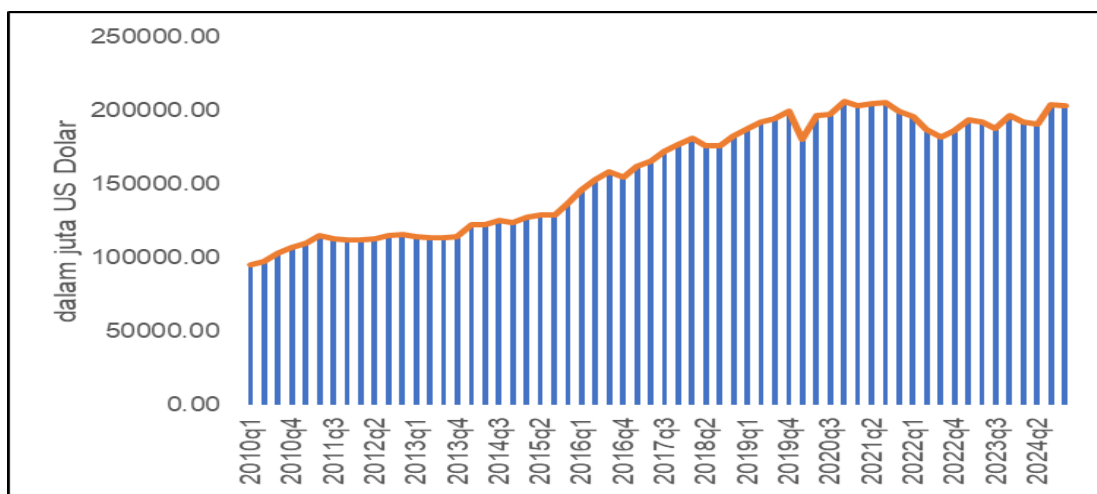
menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi, melalui perluasan program bantuan sosial, peningkatan belanja sektor kesehatan, serta berbagai bentuk stimulus ekonomi untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Selain belanja pemerintah, faktor lain yang turut berperan dalam memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah utang luar negeri pemerintah atau yang dikenal sebagai utang publik. Instrumen ini memiliki posisi strategis dalam pembiayaan pembangunan, karena digunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek penting di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program prioritas nasional yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Di samping itu, utang publik juga berfungsi sebagai sumber pendanaan dalam menutup defisit anggaran, terutama ketika penerimaan negara belum mampu membiayai seluruh kebutuhan belanja pemerintah.

Relasi antara utang publik dan pertumbuhan ekonomi bersifat tidak statis, melainkan bergantung pada kualitas pengelolaannya. Apabila dialokasikan secara produktif dan disertai tata kelola fiskal yang baik, utang publik berpotensi memperkuat kapasitas produksi serta meningkatkan daya saing ekonomi melalui investasi yang bernilai tambah. Sebaliknya, penggunaan utang yang tidak efisien atau tidak produktif justru dapat menimbulkan tekanan fiskal dan menghambat pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Dalam konteks Indonesia, stabilitas pertumbuhan ekonomi yang berada di sekitar 5% selama satu dekade terakhir menunjukkan bahwa pemanfaatan utang luar negeri masih relatif terkendali, meskipun risiko peningkatan rasio utang terhadap PDB tetap perlu dicermati. Dalam perspektif jangka menengah hingga

panjang, kesinambungan pengelolaan utang luar negeri sangat ditentukan oleh efektivitas pemanfaatannya dan kondisi stabilitas makroekonomi. Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya menjaga rasio utang terhadap PDB agar tetap berada pada tingkat yang aman melalui penerapan prinsip kehati-hatian fiskal. Upaya tersebut juga diiringi dengan penguatan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan serta peningkatan kualitas belanja publik guna mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang.



Grafik 1. 3 Utang Publik Indonesia Periode 2010q1-2024q2

Sumber: Bank Indonesia, 2024

Sejalan dengan itu, Grafik 1.3 menunjukkan kecenderungan peningkatan signifikan utang publik Indonesia dari sekitar 100 miliar dolar AS pada awal dekade 2010 hingga mendekati 210 miliar dolar AS pada 2024 kuartal II. Kenaikan ini berlangsung relatif konsisten hingga 2019, kemudian diikuti fluktuasi pada periode 2021–2022 yang dipengaruhi oleh faktor nilai tukar, restrukturisasi kewajiban, serta kebijakan pembiayaan domestik selama masa pandemi. Peningkatan utang tersebut erat kaitannya dengan perluasan belanja infrastruktur dan sosial, seiring

pelaksanaan program Nawacita dan proyek-proyek strategis nasional pada periode awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya memperlihatkan adanya kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun dalam periode yang sama konsumsi pemerintah dan utang publik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk dilakukan pengkajian yang lebih mendalam. Sejumlah penelitian empiris telah mencoba mengkaji hubungan tersebut dengan temuan yang beragam. (Ahuja & Pandit, 2020) menunjukkan bahwa belanja pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang, namun dampaknya tidak bersifat universal karena di sejumlah negara justru tidak memberikan kontribusi yang positif. Temuan serupa dikemukakan oleh (Olaoye & Afolabi, 2021) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tidak akan efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila tidak didukung oleh tata kelola yang memadai. Sementara itu, (Onifade et al., 2020) bahkan menemukan bahwa belanja pemerintah dapat memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian terkait utang publik juga menunjukkan kesimpulan yang tidak seragam. (Chudik et al., 2021) (Marmullaku et al., 2020) menemukan bahwa utang pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (Hajian et al., 2022) mengemukakan bahwa utang tidak berperan sebagai pendorong pertumbuhan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Berbeda dengan itu, (Matandare & Tito, 2018) menemukan bahwa utang publik berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Zimbabwe. Di sisi lain, (Marmullaku et al., 2020)

menunjukkan bahwa utang publik yang disalurkan melalui investasi pemerintah justru dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, (Reinhart & Rogoff, 2010) menyimpulkan bahwa utang publik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hanya sampai pada batas tertentu, setelah melewati ambang tersebut dampaknya berubah menjadi negatif.

Perbedaan hasil temuan pada berbagai studi terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang masih terbuka. Variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan spesifikasi model, rentang waktu pengamatan, pemilihan variabel, serta pendekatan metodologis yang digunakan oleh masing-masing penelitian. Perbedaan ini pada akhirnya menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten mengenai arah maupun tingkat signifikansi pengaruh antar variabel yang diteliti. Temuan empiris yang berlaku pada satu periode tertentu belum tentu relevan untuk periode yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kajian dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan data yang lebih mutakhir. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian yang ada serta memberikan kontribusi empiris yang lebih kontekstual, sehingga dapat menjadi referensi yang kredibel bagi perumusan kebijakan dan pengembangan penelitian selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam studi ini yaitu Apakah konsumsi pemerintah, utang luar negeri pemerintah, inflasi, dan keterbukaan perdagangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- (1) menganalisis pengaruh jangka panjang konsumsi pemerintah, utang luar negeri, inflasi, dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- (2) menganalisis pengaruh jangka pendek masing-masing variabel tersebut, serta
- (3) menganalisis mekanisme penyesuaian jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam kajian makroekonomi yang berkaitan dengan peran konsumsi pemerintah dan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data terbaru, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi dan peneliti dalam mengkaji dinamika hubungan fiskal dan pertumbuhan ekonomi, serta memperkaya literatur terkait kebijakan fiskal dan pengelolaan utang negara.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk menilai sejauh mana konsumsi pemerintah dan utang luar negeri berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam pengelolaan anggaran dan utang luar negeri.